

# EFEKTIVITAS PERENCANAAN ANGGARAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

Akhmad Zakky Ramadhan  
NPP. 30.0770

Asdaf Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Keuangan Publik  
[zakkyakh@gmail.com](mailto:zakkyakh@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Tumija, S.Pd., M.M

## ABSTRACT

**Background / Research Gap:** Gresik Regency has the ability to implement Good Governance through an Electronic-Based Government System (SPBE), especially in regional financial governance where the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) is the key to E-government success. **Objective:** This study aims to determine the effectiveness of budget planning, obtain an explanation of inhibiting factors and SIPD strategies in preparing budget planning in Gresik Regency. **Methods:** The research used a descriptive qualitative method with an inductive approach, because the author first observed the problem then drew conclusions derived from interviews, observations and documentation activities. **Research Results:** In organizing financial governance, especially in the budget planning process, it can be said to be effective because it has fulfilled the theory used in the research, although there are things that must be evaluated for improvement. The main obstacle in this study is the OPD's delay in inputting SIPD. Strategies to overcome obstacles using the ASOCA strategy with the collaboration of internal and external factors so that strategies to overcome problems in research will be found. **Conclusion:** Based on the research results, the implementation of financial governance, especially in the budget planning process, can be said to be effective because it is in accordance with the research theory and fulfills the dimensions of usefulness, dimensions of accuracy and objectivity, dimensions of scope, dimensions of cost effectiveness, dimensions of accountability, but needs evaluation in the dimension of timeliness.

**Keywords:** Effectiveness, Budget Planning, SIPD.

## ABSTRAK

**Latar Belakang / GAP Penelitian :** Kabupaten Gresik memiliki kemampuan menerapkan *Good Governance* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) khususnya dalam tata kelola keuangan daerah dimana penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi kunci kesuksesan *E-government*. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, memperoleh penjelasan faktor penghambat dan strategi SIPD dalam penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Gresik. **Metode :** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil Penelitian :** Dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi teori yang dipakai dalam penelitian meskipun terdapat hal yang harus dievaluasi untuk diperbaiki. Hambatan utama yang dalam penelitian ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD. Strategi untuk mengatasi hambatan menggunakan strategi ASOCA dengan kolaborasi faktor internal dan eksternal sehingga akan ditemukan strategi mengatasi masalah dalam penelitian. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah sesuai dengan teori penelitian dan memenuhi dimensi kegunaan, dimensi ketepatan dan objektivitas, dimensi ruang lingkup, dimensi efektivitas biaya, dimensi akuntabilitas, namun perlu evaluasi dalam dimensi ketepatan waktu.

**Kata Kunci : Efektivitas, Perencanaan Anggaran, SIPD.**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Era Globalisasi dan Digitalisasi saat ini menjadi kewajiban bagi tiap orang untuk mengikuti perkembangan zaman, dimana kenyataannya saat ini telah melewati Revolusi Industri 4.0 dan menuju ke era *Society 5.0* menuntut manusia untuk berkembang dan berpikir bagaimana caranya untuk mempermudah pekerjaan mereka saat ini menuntut setiap orang untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan juga teknologi yang berkembang dengan pesat dan signifikan di dunia pendidikan, industri, marketing bahkan di sektor pemerintahan dituntut untuk transformasi digitalisasi di segala bidang. Digitalisasi menjadi kewajiban untuk aktivitas zaman sekarang, Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menuntut semua orang tanpa terkecuali untuk memanfaatkan teknologi digital dengan harapan untuk masa mendatang. (Sandiasa & Agustana, 2018)

Upaya revitalisasi birokrasi termasuk dalam penataan kelembagaan, *good governance* telah dijadikan referensi utama, terutama dalam membangun kolaborasi yang efektif antara 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dengan mengusung nilai-nilai seperti kompetensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, keadilan sosial (A.H Rahadian, 2019). Berkembangnya pesat zaman yang semakin canggih di

masing-masing daerah tidak lepas dari peran perencanaan yang efektif dan andal yang dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Poin penyampaian informasi keuangan daerah yang sekarang disebut informasi keuangan daerah adalah sistem yang digunakan untuk mengolah dan informasi, penyusunan secara elektronik, monitoring dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah Rekapitulasi Ketersediaan Data Pemda di SIPD.

**Tabel 1. 1**  
**Rekapitulasi Ketersediaan Data Pemda di SIPD**

Pemerintah Daerah	Total Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedia SIPD	%
Provinsi	34	34	100.00
Kabupaten	416	379	91.33
Kota	98	87	93.55

Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Informasi yang terdapat pada tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa Rekapitulasi Ketersediaan Data Pemda di SIPD pada Pemerintah Provinsi telah terintegrasi secara menyeluruh yaitu 100%, pada Pemerintah Kabupaten terintegrasi sebanyak 91,33% dan pada Pemerintah Kota terintegrasi sebanyak 93,55%. Aplikasi SIPD digunakan dengan metode penggunaan aplikasi secara integrasi dan input langsung, dimana tiap Pemerintah Daerah dapat menggunakan metode tersebut sehingga terdapat data Metode Penggunaan Aplikasi SIPD pada masing-masing Pemerintah Daerah pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Metode Penggunaan Aplikasi SIPD**

Metode Penggunaan			
	Integrasi	Input Langsung	Belum Pilih Metode
Provinsi	22	12	0
Kabupaten	210	168	37
Kota	57	30	6
Total	289	210	43

Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

SIPD juga menggunakan teknologi informasi untuk jaringan pengumpulan data *online* dan *real-time* terpadu pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan

program dan kegiatan, dan untuk melakukan penelitian secara rasional, efektif dan efisien untuk menilai pembangunan daerah. Sistem ini juga sebagai dukungan integrasi penggunaan data terkait pembangunan di setiap instansi lingkup pemerintah. (Dipua et al., 2020). Penggunaan SIPD ini dalam bentuk website dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Namun dalam prakteknya, tidak mudah untuk menerapkan aplikasi ini kepada pemerintah daerah, dan perlu keseragaman pelaksanaan kerjasama antar instansi, pengaturan dan penguatan waktu bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Terciptanya SIPD memang sebuah terobosan dari pemerintah pusat namun terdapat beberapa permasalahan, menurut informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Gresik terdapat beberapa masalah dalam penerapan SIPD yakni belum keseluruhan dari pengelolaan keuangan daerah memakai SIPD masih terfokus pada perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, terbatasnya sarana dan prasarana dari masing masing Pemda, masih kurang pengetahuan teknologi dari ASN dalam pengoperasian SIPD, jaringan down yang diakibatkan oleh akses seluruh Indonesia secara menyeluruh, adanya tahanan yang terlambat pada penatausahaan, sebab aplikasi belum sepenuhnya sempurna dalam tahapan ini, sehingga ditemukan kendala-kendala lapangan dan teknis.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil**

1. Sifat SIPD yang terkesan memaksa namun diharuskan bagi setiap Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, aplikasi SIPD harus digunakan pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan dan pembangunan.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasana yang dimiliki untuk menunjang dan mendukung adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah membuat lambatnya beberapa daerah untuk menerapkan SIPD secara keseluruhan di Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam mengoperasikan SIPD dengan baik, karena segala pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik tidak lain berasal dari SIPD.
4. Terjadi Kendala Teknis di lapangan, seperti belum keseluruhan pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD, jaringan dan sistem aplikasi down, membuat pemerintah pusat harus mengevaluasi adanya aplikasi ini agar sistem berjalan dengan baik, karena segala sesuatu kegiatan Pemerintah Dalam SIPD.

## **1.3 Penelitian terdahulu**

Penelitian dari Putri (2019) dimana dijelaskan suatu sistem sebelum adanya SIPD yaitu *e-planning* di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian tersebut memuat bahwa *e-Planning* merupakan sistem yang optimal digunakan oleh OPD Dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Dan Dokumen Pelaksana Anggaran Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Kemudian pada penelitian kedua Rafiani (2020) memaparkan analisis kesiapan SIPD yang telah digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Pagaram, hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa SIPD membantu pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, lebih mudah, lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini dirancang terintegrasi seluruh Indonesia sehingga memudahkan kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya pada penelitian ketiga melakukan penelitian tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada saat penyusunan rencana Pendapatan Dan Belanja Daerah dan didapatkan hasil yaitu dalam menghadapi Transformasi Birokrasi, maka satu data dan satu sistem dalam satu SIPD hadir dengan cita-cita besar untuk memudahkan alur birokrasi dan keterbukaan informasi seluas luasnya bagi seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Penelitian berikutnya penelitian keempat Nasution & Nurwani (2021) melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kota Medan didapatkan hasil yaitu BPKAD di kota medan sudah mengimplementasikan SIPD untuk melaksanakan kebijakan dan membuat program dari pemerintah kota medan yang dapat berguna dalam sistem pemuatan penyusunan rencana pembangunan melalui siskeuda, dan sistem lainnya yang digunakan pemerintah termasuk membina dan mengawasi pemerintahan daerah.

#### **1.4 Pernyataan kebaruan ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian terbaru yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan belum pernah dilakukan sebelumnya yakni Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Penyusunan anggaran akan dimulai dari Rancangan Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian akan diinput *by system* melalui support Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan pada sistem tersebut, yang berdasar dari usulan OPD mengusulkan harga yang akan dicocokkan dengan pemerintahan pusat.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberikan hasil penelitian yang berguna dan bermanfaat dalam memahami efektivitas perencanaan anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah dimana di era digitalisasi dituntut untuk menggunakan aplikasi dengan harapan sistem yang dibuat pemerintah pusat ini berjalan dengan efektif dan efisien dan sebagai wujud inovasi pemerintah untuk mengintegrasikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah

## **II. METODE**

Pandangan Simangunsong (2017:177) menyampaikan bahwa terdapat tiga metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Metode penelitian kualitatif
- b. Metode penelitian kuantitatif
- c. Metode penelitian gabungan

Lebih lanjut dijelaskan oleh Moleong (2011:60) yang menjelaskan metode penelitian bahwa :

“Tujuan dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang ada yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.”

Kemudian Noor (2011:35) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif berdasarkan sifatnya memiliki proses atau langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yakni : timbulnya masalah, penentuan jenis informasi yang dibutuhkan, penentuan prosedur pengumpulan data melalui observasi, pengolahan informasi, dan menarik kesimpulan. Pendekatan kualitatif, model induktif diawali dengan mengembangkan teori atau membandingkan pola dengan teori lain dimana selanjutnya penulis mencari pola yang kemudian diikuti dengan membentuk kategori atau klasifikasi, mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi. Pada kegiatan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang deskriptif serta dengan pendekatan secara induktif untuk meneliti penerapan aplikasi SIPD untuk melihat suatu sistem terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menyusun suatu perencanaan anggaran.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

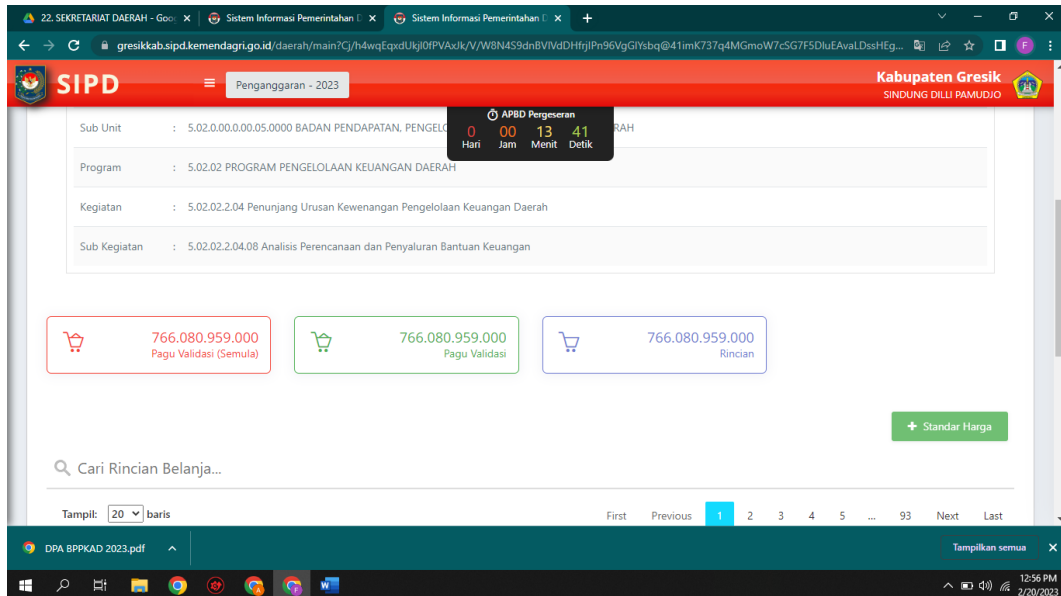
#### **3.1 Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur**

Menurut Handoko (2003:103) ada beberapa kriteria efektivitas perencanaan, diantaranya:

1. Kegunaan;
2. Ketepatan dan objektivitas;
3. Ruang lingkup;
4. Efektivitas biaya;
5. Akuntabilitas;
6. Ketepatan waktu;

##### **a. Dimensi Kegunaan**

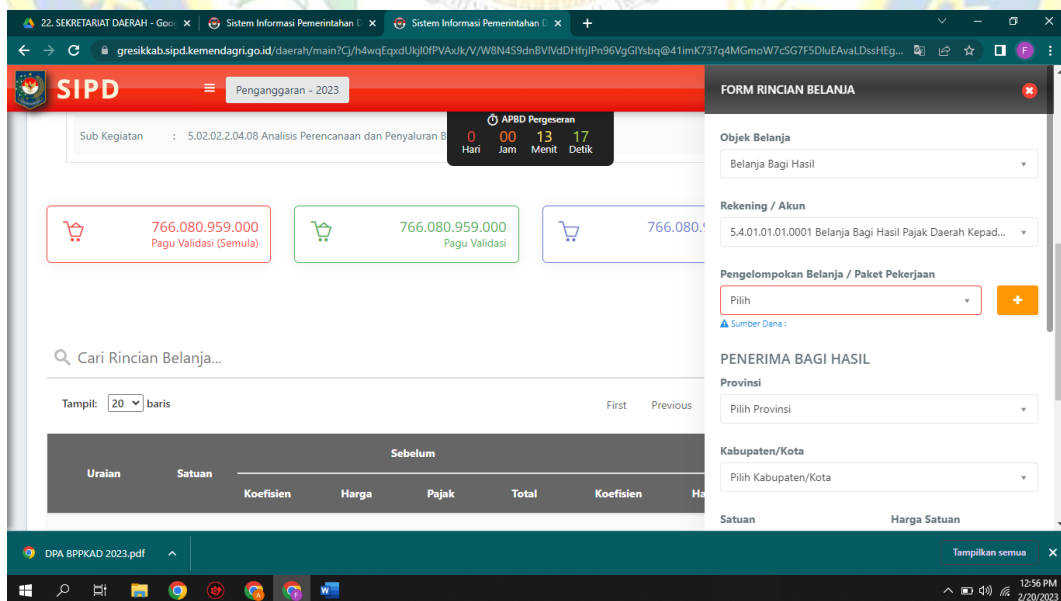
Hasil beberapa wawancara yang penulis laksanakan dan observasi di lapangan dapat ditarik kesimpulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintahan pusat sebagai penyedia informasi untuk masyarakat dimana sistem tersebut dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah yang menyelenggarakan jalannya pemerintahan dengan hasil sebuah layanan sarana informasi yang mengintegrasikan dan menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terhadap pengelolaan tata pemerintahan yang efisien dan akuntabel. untuk melaksanakan perencanaan yang matang dan efektif dengan dapat memberikan waktu lebih dalam sistem tersebut demi kelancaran suatu perencanaan seperti dalam gambar tampilan berikut:



Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

**b. Dimensi Ketepatan dan Objektivitas**

Sistem yang diciptakan kemendagri ini bertujuan untuk transparansi anggaran yang nyata sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tujuan yang dimaksud oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Hasil wawancara dari beberapa narasumber dan kondisi lapangan dapat disimpulkan adanya suatu sistem dari Pemerintah Pusat tidak lain adalah akan menciptakan keakuratan dalam pengelolaan pemerintahan daerah khususnya dalam penentuan rencana anggaran yang dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan. untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang akurat seperti pada gambar dibawah ini :



Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

**c. Dimensi Ruang lingkup**

Ruang lingkup dari sistem ini, ASN menginput sesuai dengan prioritas yang diperlukan oleh OPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan instansi masing-masing. Sistem telah dilengkapi dengan tahapan-tahapan penyusunan yang memiliki waktu tiap tahapannya, semuanya telah disediakan secara menyeluruh dalam sistem yang membuat ASN harus siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai pedoman. Sesuai dengan tampilan utama, ruang lingkupnya adalah Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Ruang lingkup tersebut dapat dilihat pada tampilan berikut :



Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

**d. Dimensi Efisiensi Biaya**

Sistem ini berbasis aplikasi dimana penerapan kedepan daerah tidak perlu menganggarkan biaya untuk membangun aplikasi atau sistem terkait perencanaan dan keuangan, sehingga menimbulkan efektivitas biaya dari sistem ini.

**e. Dimensi Akuntabilitas**

Bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan dan implementasi yang telah dibuat oleh OPD tersebut dituangkan dalam sistem, dijadwalkan oleh Bidang Anggaran, User dapat menginput data tepat waktu dalam perencanaan ini kemudian dengan adanya sistem ini otomatis tinggal cetak saja, tanpa perlu editing manual sehingga terjadi efektivitas penyusunan perencanaan anggaran. demi mewujudkan akuntabilitas kinerja ASN pertanggungjawaban pasca perencanaan dituangkan dalam suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>			
Kab. Gresik Tahun Anggaran 2023			<b>DPA REKAPITULASI SKPD</b>
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.05.0000/001/2023			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
<b>4</b>		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4 1</b>		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp1.002.872.239.773</b>
4 1 01	Pajak Daerah		Rp940.182.000.000
4 1 02	Retribusi Daerah		Rp14.000.000.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp13.660.000.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah		Rp35.030.239.773
<b>4 2</b>		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp2.266.268.983.000</b>
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Rp1.869.128.583.000
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Rp397.140.400.000
		<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp3.269.141.222.773</b>
<b>5</b>		<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5 1</b>		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp77.744.629.414</b>
5 1 01	Belanja Pegawai		Rp61.179.515.864
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa		Rp16.565.113.550
<b>5 2</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp1.619.028.000</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp1.509.489.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Rp109.539.000
<b>5 3</b>		<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp10.000.000.000</b>
5 3 01	Belanja Tidak Terduga		Rp10.000.000.000
<b>5 4</b>		<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp883.271.249.000</b>

Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

#### f. Dimensi Ketepatan waktu

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem berbasis aplikasi yang *real time* dimana verifikasi input data oleh OPD atas kegiatan, sub kegiatan dan program yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran, oleh karena itu ketepatan waktu input data diperlukan dalam efektivitas perencanaan anggaran. ketepatan waktu input data diperlukan rentan waktu yang diberikan oleh Admin dapat dilihat pada gambar berikut :

Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

### **3.2 Faktor yang menghambat Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Gresik.**

Pada saat melaksanakan penelitian yang telah berlangsung, penulis telah menemukan beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Gresik. Faktor tersebut antara lain :

#### **a. Keterlambatan OPD saat input data**

Hasil wawancara kami dengan Admin Sistem Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran ketepatan waktu penyusunan perencanaan anggaran menjadi kunci utama cepat dan lambatnya proses penganggaran yang terjadi, rentan waktu yang diberikan.

#### **b. Dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Hal ini memerlukan cetak fisik dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang harus membutuhkan biaya untuk dokumen fisik dari penyusunan anggaran.

#### **c. Tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan**

Hal ini dikarenakan keterbatasan admin sistem ini untuk menguasai dan mengelola data yang ada sehingga menghambat proses perencanaan anggaran yang dilakukan dan dijadwalkan oleh bidang anggaran selaku pembuat kebijakan.

#### **d. Verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama**

DPA-SKPD yang telah selesai di tandatangani kepala OPD akan diberikan kepada Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian akan diserahkan ke 22 ASN yang bertindak sebagai Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Bersama tiga Asisten Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik dan lain sebagainya.

### **3.3 Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik**

Pada saat melaksanakan penelitian yang telah berlangsung, penulis mencari informasi mengenai strategi mengatasi faktor penghambat Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Gresik. Faktor tersebut antara lain :

#### **a. Memberikan toleransi tenggat waktu**

Bidang Anggaran telah memberikan toleransi kepada OPD untuk memenuhi hal yang sudah ditetapkan menjadi target menyelesaikan penyusunan rencana anggaran yang diminta oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.

**b. Mengurangi Jumlah Cetak Dokumen Fisik**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen memerlukan cetak fisik dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang harus membutuhkan biaya untuk dokumen fisik dari penyusunan anggaran, menurut informasi yang kami dapat jalan keluarnya adalah mengurangi menjadi maksimal dua rangkap saja, untuk pertanggungjawaban bidang anggaran dan pelaporan kepada sekretaris daerah dan inspektorat sebagai badan pengawas masing-masing dapat melihat pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

**c. Memberikan Peringatan pada kolom chat SIPD**

Mengukur sebuah keefektifan secara tepat sudah pasti mempunyai relasi yang kuat dengan tujuan diterapkannya sistem ini, setiap penggunaan data masing-masing instansi menuju pada server terpusat sehingga hasil dari informasi saling terkoneksi dengan tujuan untuk menyelaraskan sistem.

**d. Dapat di verifikasi secara online**

Sistem harusnya membuat verifikasi online dengan tujuan efektivitas penyusunan perencanaan anggaran, disamping tidak membutuhkan waktu lama, verifikasi online juga dapat efisiensi biaya. Namun sejatinya dalam perencanaan pemerintahan daerah tetaplah memerlukan dokumen fisik tersebut

**3.4 Diskusi Utama Penelitian**

Output dari semua ini akan menjadi RKPD yang kemudian akan dijadikan penyusunan anggaran melalui KUA/PPAS, setelah itu penyusunan anggaran akan dimulai menjadi Rancangan Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian akan diinput by system melalui support Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan pada sistem tersebut, yang berdasar dari usulan OPD mengusulkan harga yang akan dicocokkan dengan pemerintahan pusat,

Sesuai amanat dari bapak presiden untuk mencocokkan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang merupakan, besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa dan gabungan barang dan jasa akan dikompilasi menjadi SSH. Lalu akan dientry oleh OPD dijadikan dasar untuk KUA/PPAS akan menjadikan penyusunan anggaran secara terperinci satu persatu masing masing belanja akan diinput dalam sistem.

**3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penelitian Putriani & Fanida (2022) SIPD bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif an efisien berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya Widiya, (2022) telah menjelaskan bahwa tujuan dari sistem ini untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah dengan akuntabel, bersih efektif demi mendorong pencapaian SDGs dalam negara Indonesia ini, kemudian Vitriana (2022) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki alat bantu yang efektif menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan dari Peraturan terkait, perbandingan penelitian sebelumnya, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan dimensi dan teori yang dipakai pada

operasionalisasi konsep, maka penulis dapat menarik poin penting hasil penelitian berasal dari wawacara dari admin dan user SIPD yang menjelaskan bahwa Tahap perencanaan yang dimulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kalau istilah didalam sistem merupakan pembukaan kamus usulan, kamus tersebut akan mengutamakan tema atau judul yang menjadi prioritas penyusunan anggaran satu tahun kedepan, tema ini berasal dari pemerintahan pusat, seperti pengentasan kemiskinan diutamakan, pemberdayaan masyarakat dll, tema tersebut akan menjadi detail dan pedoman bagi pemerintahan daerah untuk menyusun anggaran. Dari tema tersebut akan masuk perencanaan yang akan dipilih di kamus usulan oleh DPRD berdasarkan masyarakat, pemerintah daerah kemudian dijadikan perencanaan pembangunan oleh BAPPEDA diketahui oleh sekretariat dewan, melalui User SIPD yang dipegang oleh masing-masing kepala bidang di BAPPEDA.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah sesuai dengan teori penelitian dan memenuhi dimensi kegunaan, dimensi ketepatan dan objektivitas, dimensi ruang lingkup, dimensi efektivitas biaya, dimensi akuntabilitas, namun perlu evaluasi dalam dimensi ketepatan waktu. Alur perencanaan secara singkat dimulai dari RKPD yang menjadi pedoman penyusunan anggaran melalui KUA/PPAS, setelah itu penyusunan anggaran akan berlanjut menjadi Rancangan Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian akan diinput *by system* melalui Standar Satuan Harga (SSH) ditetapkan sistem berdasar usulan OPD yang mengusulkan harga yang akan terintegrasi dengan pemerintahan pusat, semua ini akan menghasilkan Peraturan Daerah APBD dan pada pelaksanaannya sesuai dasar pelaksanaan pengguna anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
2. Hambatan yang terjadi pada saat melakukan penelitian yaitu keterlambatan OPD saat input data, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, selanjutnya tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan, kemudian verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama. BPPKAD senantiasa memberikan solusi yang kooperatif agar sistem ini tetap berjalan semestinya dan penyusunan anggaran akan sesuai dengan tujuan hasil yang memuaskan mencapai target dan sasaran yang dicapai khususnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
3. Strategi untuk mengatasi hambatan menggunakan ASOCA dengan kolaborasi faktor internal dan eksternal sehingga akan ditemukan strategi untuk masing masing masalah dalam penelitian pelatihan pelayanan prima pada kegiatan peningkatan kualitas SDM, BPPKAD Kabupaten Gresik memiliki kemampuan dalam tata kelola keuangan sesuai ketentuan mencapai 100% dengan perkembangan teknologi informasi yang baik, kemudian memanfaatkan ketersediaan sistem didukung regulasi pengelolaan keuangan daerah, serta menggunakan dukungan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPKAD.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang cukup singkat, selain itu minimnya narasumber yang ahli dalam SIPD membuat terhambatnya pemecahan studi kasus yang dipilih sesuai dengan teori yang digunakan.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari penelitian ini tergolong baru dan awal temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada rekan-rekan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan Efektivitas Perencanaan Anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Dr. Marja Sinurat, M.Pd, M.M selaku Kepala Program Studi Keuangan Publik, Bapak Tumija S.Pd., M.M. selaku Dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi; Bapak Dr. Asep Hendra, SE, MM. dan Ibu Ika Agustina, SE, M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, serta ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini; Bapak/Ibu Dosen Pengajar, Pelatih dan Pengasuh serta seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Segenap Dosen, Pelatih, Pengasuh, Karyawan serta seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Pemerintah Kabupaten Gresik, Kepala Badan dan Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) serta seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang telah membantu saya dalam pelaksanaan penelitian; Sahabat yang selalu memberikan bantuan serta dukungannya dalam menyelesaikan Skripsi ini; Rekan-rekan angkatan XXX SATYA HAPRABU; Dulur Kontingen Jawa Timur XXX yang telah berjuang bersama dari awal pendidikan hingga saat ini; Rekan-rekan kelas F5 yang selama 4 tahun ini menemani masa-masa perkuliahan; Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- A.H Rahadian. (2019). REVITALISASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI BIROKRASI MENUJU E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Prosiding Seminar Stiami*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.37700/0033-2909.126.1.78>
- Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). An Analysis Of The South China Sea Conflict: Indonesia's Perspectives, Contexts And Recommendations. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573-

3588.

- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Putri, E. E. (2019). *Optimalisasi E-Planning Dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Dan Dokumen Pelaksana Anggaran Di Kabupaten Gresik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Putriani, F., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung). *Publika*, 10(4), 1257–1268.
- Rafiani, A. (2020). *Analisis Kesiapan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagaram*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–9. Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah.html
- Simangunsong, F. (2017). *Netodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Vitriana, N., Agustawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1), 64–77.
- Widiya. (2022). *Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten ogan komering ilir*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA.